

***Interrelationship* Penunaian Ibadah Haji dengan Kedaulatan Dan Keutuhan NKRI**

Robingun Suyud El Syam, Salis Irvan Fuadi, Machfudz

Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

Abstract

Maintaining the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia is the duty of every citizen. The act of deceiving prospective Furoda pilgrims with fake visas means injuring the country in the eyes of the international community. The study uses an explanatory approach to explain the position and relationship between the pilgrimage and the sovereignty and integrity of the Republic of Indonesia, using literature data to be processed and analyzed comparatively. The research results: that the pilgrimage is a ritual that gives a deep impression on the people so that it can foster a capable militancy of knowledge and high fighting spirit. This spirit is able to move people to act bravely to sacrifice their body and soul in the name of the state for the sake of religion. Here there is a reciprocal action and reaction between the two, on the one hand the pilgrimage can be performed for sovereign citizens, and the state needs its citizens to realize and maintain its sovereignty. This reciprocal relationship binds each other so that it becomes the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so all actions that cause a bad perception for Indonesia are included in the category of injuring the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keyword: Interrelationship, Hajj, Sovereignty, Wholeness, NKRI

Abstrak

Menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI merupakan kewajiban setiap warga negara. Tindakan menipu calon jemaah haji Furoda dengan visa palsu berarti menciderai negara di mata dunia Internasional. Penelitian menggunakan pendekatan eksplanatif untuk menjelaskan kedudukan dan hubungan antara ibadah haji dengan kedaulatan dan keutuhan NKRI, memakai data literatur untuk diolah dan dianalisis komparatif. Penelitian menghasilkan: bahwa ibadah haji merupakan ritual yang memberi kesan mendalam terhadap umat sehingga bisa menumbuhkan militansi ilmu yang mumpuni dan semangat juang tinggi. Semangat ini mampu menggerakkan orang bertindak berani mengorbankan jiwa raga atas nama negara demi agama. Di sini terdapat aksi dan reaksi timbal balik antara keduanya, di satu sisi ibadah haji bisa ditunaikan bagi warga negara yang berdaulat, dan negara membutuhkan warganya untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatannya. Relasi timbal balik ini saling mengikat satu sama lain sehingga menjadi keutuhan NKRI, maka segala tindakan yang menimbulkan persepsi buruk bagi Indonesia termasuk kategori menciderai kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Kata kunci: *Interrelationship*, Hajj, Kedaulatan, Keutuhan, NKRI.

A. Pendahuluan

Jemaah haji Indonesia dinilai negara lain mempunyai ciri kesantunan dan sikap saling menghormati yang baik, karenanya setiap jemaah mengemban misi menjaga identitas NKRI tersebut (Kemenhub 2010). Menjaga nama baik NKRI merupakan suatu keharusan bagi Jemaah haji Indonesia, sebab realitasnya mereka merupakan delegasi dari Indonesia, tidak diperkenankan melakukan tindakan mencederai NKRI selama menunaikan ibadah di tanah suci (Siregar 2022), bahkan, setelah pulang dari tanah suci pun, mereka seharusnya lebih mencintai tanah kelahiran Republik Indonesia serta meningkat kasih sayangnya terhadap sesama (Fauzi 2022).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan warisan berlian nenek moyang bangsa Indonesia. Ia diperoleh dengan proses panjang dan melelahkan. Kehadirannya bukanlah sekedar pemberian, akan tetapi didapat berkat perjuangan tanpa lelah para pendahulu, para pahlawan kemerdekaan sehingga eksistensi NKRI dikukuhkan. Mereka para berjuang, demi menggapai apa yang disebut “kemerdekaan” rela mengorbankan jiwa raga, sebuah jasa yang luar biasa. Karenanya, bangsa Indonesia mesti menghargai keagungan kontribusi para pahlawan kemerdekaan itu, dalam bentuk merawat negara yang berdaulat NKRI (Anam 2014, 210).

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan sebuah konsensus nasional yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Para pemuda pendiri bangsa mampu meredam berbagai penghianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis, bahkan perjuangan politik legal melalui konstituante untuk merubah konsensus tersebut (Shaifudin 2020, 34). Disini, nasionalisme bernilai spiritual akan mampu mendorong seseorang mengorbankan harta, jiwa dan raganya untuk bangsa. Segala darma telah dibuktikan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, mereka rela mengorbankan segala miliknya tanpa pamrih untuk membebaskan tanah air dari belenggu penjajahan demi mencapai NKRI (Hamid 2018, 24).

Maka dari itu, tidak diperkenankan segala bentuk tindakan yang mencoreng maupun mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Realitasnya, sangat disayangkan masih ada oknum, baik perorangan maupun intitusi melakukan tindakan

buruk tersebut, semisal Agen Travel yang melakukan tindakan teridentifikasi *illegal* menipu ribuan calon anggota jemaah haji *furoda*, dan akhirnya gagal berangkat ke Arab Saudi karena terkendala mengenai visa, yang menurut Syam Resfiadi setidaknya berjumlah 4.000, setidaknya 46 jemaah haji dari agen ini yang di deportasi pihak pemerintah Arab Saudi pada tahun ini (TvOne 2022). Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2012, dimana 60.000 jemaah haji ilegal asal Indonesia di deportasi pihak kerajaan Arab Saudi (Bisnis.com 2012).

Memang Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, telah mengambil sikap tegas terkait penanganan bagi travel yang menipu calon jemaah haji Furoda dengan visa non resmi (Kharismaningtyas 2022), namun imbas dari temuan jemaah tanpa visa haji resmi di Arab Saudi tersebut, kini jalur masuk ke kota Makkah semakin diperketat. Selain pemilik visa haji petugas tidak memperbolehkan masuk ke Kota Makkah. Pemeriksaan ketat ini sebagai imbas temuan banyaknya jemaah yang berupaya beribadah tanpa visa haji resmi (KompasTV 2022). Direktorat Jenderal Paspor (*Jawazat*) Arab Saudi juga menetapkan sanksi untuk jemaah haji yang tertangkap sidik jari tanpa izin akan dideportasi dalam jangka waktu 10 tahun (Rafie 2022).

Kasus tersebut tentulah menciderai nama baik NKRI di mata dunia Internasional, terutama di hadapan pemerintahan Arab Saudi. Dengan begitu, penting untuk memahami hubungan timbal balik (*interrelationship*) antara ibadah haji dengan kedaulatan dan keutuhan NKRI sehingga pemahaman tersebut bisa menjadi acuan dalam kerangka bersikap dan bertindak dalam rangka menjaga nama baik warga NKRI.

B. Metodologi

Penelitian menggunakan pendekatan eksplanatif dimana peneliti akan menjelaskan kedudukan dan hubungan (Sugiyono 2016, 14) antara ibadah haji dengan kedaulatan dan keutuhan NKRI, berdasarkan atas fakta sebagaimana adanya (Nueuman 2014, 22). Penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian *library research*, maka menggunakan data kepustakaan (Semiawan 2010), dari buku, koran, jurnal, serta berita online menjadi data utama, untuk kemudian diolah menguatkan hasil penelitian. Data kualitatif tersebut kemudian dianalisis komparatif dengan terlebih

dahulu menggambarkan sikap jemaah haji (Yin 2013, 20) idealnya, hubungan timbal balik antara ibadah haji dengan NKRI dimana keereatan realsi ini mesti diresapi oleh semua jemaah haji selepas pulang dari tanah suci.

C. Pembahasan

Peran Penunaian Ibadah Haji terhadap Kedaulatan NKRI

Sejarah mencatat aktivitas haji mempunyai peran penting bagi lahirnya negara Indonesia, terlihat jelas saat menjelang kemerdekaan, bahkan jauh hari saat masa kerajaan di mana Indonesia lebih dikenal sebagai Nusantara. Bagi muslim Nusantara, ibadah haji bukan semata menjalankan laku spiritual, namun simbol status social, legitimasi bagi warga sekitar sebagai orang taat beragama dan mampu (Rosyid 2017, 242). Ibadah haji ditunaikan muslim Nusantara sejak abad ke-16 M (Khan and Khalili 2022), pertama kali bukanlah jemaah haji murni, teta[i pedagang, utusan sultan, dan pencari ilmu (Putuhena 2007, 105).

Carita Parahiyang mengisahkan pemeluk Islam pertama sunda Bratalegawa (1357-1371) bergelar Raja Haji Purwa. Tokoh lain Walang Sungsang dan Rara Santang, mereka pergi haji tahun 1446-1447. Di sana Rarasantang dinikahi Sultan Mesir Syarif Abdullah, melahirkan Syarif Hidayatullah (1448) dan Syarif Arifin (1450). Walang Sungsang berganti nama Haji Abdullah Iman, Rarasantang berganti nama Hajjah Syarifah Mudaim (Zaenal 2012, 97-98). Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) beserta putranya Hasanuddin dan sunan Ampel juga menjalankan ibadah haji pada paruh tahun 1500-an (Kompasiana 2017).

Radeh Fatah berhaji tahun 1479, lantas Sultan Turki mengukuhkan sebagai *Khalifatullah ing Tanab Jawa* dengan gelar Sultan Alam Akbar (Subarkah, 2016). Tahun 1620-an, pangeran Rangsang dari Keraton Mataram menuniakan ibadah haji beserta rombongan dn menghadap penguasa otoman dan diberi restu untuk memakai gelar Sultan, maka saat naik tahta ia bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sejak saat itu, Raja Mataram bergelar Sultan. Setelah itu ada juga sultan Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) juga berhaji.

Tahun 1674, Sultan Ageng Tirtayasa memberangkatkan putranya Abdul Qahhar menunaikan ibadah haji, kemudian hari bergelar Sultan Haji. Fungsi haji sebagai legitimasi politik terlihat jelas sekali dalam sejarah Banten (Bruinessen, 1990). Pangeran Diponegoro semasa hidupnya telah melakukan ibadah haji ke tanah suci sebanyak tiga kali dan

yang terakhir di tunaikan tahun 1808, 17 tahun sebelum perang Jawa (1825-1830 M). Pangeran Diponegoro mengaungkan semangat perang *fi sabilillah melawan kolonialis Belanda*. Hal ini mendapat banyak simpati dari kaum bangsawan dan para ulama serta Kiai Jawa. Kondisi demikian melibatkan kaum santri ikut serta mengikuti jejak para ulama (Carey, 2012).

Menjelang kemerdekaan, tokoh yang kembali dari tanah suci usai melaksanakan ibadah haji muncul digarda depan memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai contoh pendiri gerakan Sarekat Islam, Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto. Ia kaum bangsawan pribumi lebih familier dipanggil Haji daripada gelar bangsawannya. Saat berada di tanah suci, mendalami ilmu agama, berinteraksi dengan tokoh Islam dunia, turut serta dalam konferensi Islam sedunia tahun 1926 di Mekkah. Ia mengobarkan semangat juang dengan semboyan berbahasa Jawa, "*Kerso, Koewoso, Merdiko*" (kuat, berkuasa, merdeka).

Hal ini melecut semangat anti Penjajah, perlawanan rakyat Cianjur (1883), rakyat Cilegon (1888) dan rakyat Garut (1919). Ia merupakan teladan, bahwa jemaah haji sepulangnya ke tanah air menjelma menjadi simbol perlawanan penjajah. Hal ini merupakan catatan penting betapa haji mampu memberi dampak politik, ditandai menguatnya politik pribumi serta penguatan citra dan budaya bangsa. Oleh karena itu pemerintah Hindia-Belanda merasa waspada kepada para haji, terutama pasca proklamasi kemerdekaan RI dan akhirnya melarang warga Indonesia berangkat haji ke Mekkah (Abdul Syukur 2020, 187).

Pasca proklamasi kemerdekaan RI, pihak Belanda di kampus Al-Azhar Kairo menekan mahasiswa Indonesia agar terus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia dengan janji memberi uang tunjangan, tetapi para mahasiswa menolak. Beberapa mahasiswa bergerak melakukan misi diplomatik ke Mesir dan negara Arab lain. Setelah ketahuan Belanda karena melakukan agitasi kepada kalangan pelaut guna mengumpulkan uang, para diaspora muda tersebut mengubah strategi dibawah "misi haji" ke tanah suci. Di sana mereka melancarkan semangat kegamaan dan sentiment anti sekutu kepada jemaah dari negara lain.

Liga Arab merespon mengundang mereka yang diwakili Abdul Latif Sijanten, Ja'far Jaenudin dan Nur Erik (Arab Saudi), Said Mahjudin dan Fuad Mohammad (Kairo), menghadiri Konferensi Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia di Mekkah

(Waal 1994). Pada kesempatan tersebut disepakati setiap anggota wajib megosiasi setiap jemaah haji dari semua negara agar menjadi perantara di negeri masing-masing untuk memberi dukungan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Perjuangan ini berhasil memperoleh *de facto* kebebasan warga Indonesia di luar negeri dari perwakilan Belanda, serta pengakuan *de facto* dan *de jure* atas kemerdekaan RI dari Liga Arab (Hassan 1980, 64).

Di Indonesia, Belanda memiliki kebijakan membuka kesempatan haji ke Mekkah. Kedatangan jemaah binaan dimaksudkan mempersatukan negara boneka yang diciptakan. Meski telah dibuka luas, jumlah jemaah haji tidak lebih dari 100 orang dipimpin Agus Salim. Dipilihnya Agus Salim sebagai salah satu pelobi karena dinilai pakar dalam bidang diplomasi dengan penguasaan bahasa Arab sangat baik. Pada akhirnya, Indonesia dari Mesir pada 10 Juni 1947, dari Suriah pada 2 Juli 1947, dari Irak pada 16 Juli 1947, dari Afghanistan pada 23 September 1947, dan dari Arab Saudi pada 21 November 1947 (Suryanegara 2018).

Pada tahun 1948 pihak pemerintah baru Indonesia bertekad menunaikan ibadah haji mengutus delegasi haji khusus, terdiri atas M. Adnan, Ismail Banda, Salih Suaidy dan Samsir Sutan Ameh, dengan misi tersembunyi menghadap Raja Arab Saudi guna memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, baik *de facto* maupun *de jure*. Misi tersebut berhasil, bahkan memperoleh dukungan penuh dari negara arab lain. Mereka menunaikan ibadah haji sambil membawa bendera merah putih, diperlihatkan kepada puluhan ribu jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Kesempatan itu juga digunakan delegasi haji Indonesia mengadakan jumpa pers, memaparkan perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda (Hafi 2020).

Dari sudut pandang lain, ibadah haji juga sukses membangun citra positif negara dari sepak terjang jemaah haji yang memiliki *iqamah* (ijin menetap) dalam durasi lama di Mekkah atau Madinah. Di sana menjadi tokoh agama yang mumpuni, sebut saja misal Syekh Arsyad Al-Banjari dikenal ahli fikih asal Kalimantan, penulis buku "*fikih perukunan melayu*", menjadi rujukan dalam fikih Islam orang-orang melayu sampai sekarang. Juga menulis kitab Sabilal Muhtadin, rujukan masyarakat Islam mazhab syafi'i di seluruh dunia, serta menjadi rujukan Universitas ternama di Mesir, Al-Azhar (Abdullah 2016, 95).

Syekh Juned Al-Betawi, jemaah haji asal Indonesia kemudian menetap lama di

Mekkah terkenal ahli tauhid, menulis kitab “*Hidayatus Sbalihin*”. Siti Rahmah, istri beliau menjadi panggilan bagi jamaah haji wanita Indonesia saat itu hingga kini, sebagai bentuk penghormatan masyarakat Arab Saudi atas wibawa dan ketokohan beliau. (Suminto 1996, 78). Ia menjadi imam di Masjidil Haram, memperoleh gelar *syaiikhul masyayikh* terkenal sepanjang abad ke-18 sampai ke-19, khususnya pengikut *Syafiiyuh* (Faturrozi 2022).

Syekh Nawawi Al Bantani, jamaah haji asal Banten dan kemudian menetap disana menjadi ulama ahli hadist, ahli fikih, mufti di Arab Saudi serta imam tetap Masjidil haram. Masyarakat dan ulama Arab Saudi memberi gelar kehormatan ‘*sayyidu ulama`il hadis*’ (pakar para ulama hadist). Beliau menulis lebih dari 115 kitab hadist, fikih dan tauhid, menjadi rujukan banyak pesantren dan perguruan tinggi. Ia merupakan pemegang peran sentral ulama asal tanah Jawa, menginspirasi mereka agar mengkaji Islam dengan serius, berperan mencetak banyak ulama pesantren, mendidik agar masyarakat Indonesia bebas dari Kolonialisme, dan memperoleh kemerdekaan. Ajaran-ajarannya dipraktekkan di Nusantara (Solahudin 2012).

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berhaji dan menetap lama disana menjadi pemuka agama dan bahkan ditunjuk pemerintah Arab Saudi menjadi imam masjidil Haram. Beliau merupakan guru dari Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH. Hasyim Asy’ari (pendiri Nahdhatul Ulama), dan Sulaiman Ar-Rusuli (Pendiri PERTI) (Mehden 1993), yang merupakan tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan RI. Posisi mereka juga menguatkan posisi negara Indonesia dalam jaringan relasi Internasional, penguat kedaulatan NKRI.

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Merupakan sebuah fakta, bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat plural dilihat dari segi suku, ras dan agama, karena menuntut sebuah konsep kebersamaan, bukan hanya secara dalam bingkai historis, sosiologis, namun juga teologis. Dari segi historis-sosiologis Indonesia adalah bangsa majemuk, yang sudah berkomitmen pada sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saidurrahman dan Arifinsyah 2018). Semua warga dibawah konstitusi harus menjunjung tinggi komitmen tersebut agar kedaulatan dan keutuhan NKRI bisa terus lestari.

Berdasar latar belakang terbentuknya, NKRI merupakan bentuk negara terdiri atas wilayah luas dan tersebar beragam adat, suku, budaya dan keyakinan, mempunyai tujuan dasar menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan adalah jiwa lahirnya NKRI sebab mengingat tentang keragaman bangsa Indonesia, yang secara gamplang bisa dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara, UUD RI 1945. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara dapat dirasakan, yakni keutuhan dan keamanan tetap terjaga, memperkuat jati diri bangsa, adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang dan tercipta suasana tentram dan nyaman (KompasTV 2021).

Ma'ruf Amin menilai, bahwa sebagai negara berbentuk republik, hal ini kerap dipandang tidak Islami, sehingga muncul pergolakan dengan maksud ingin mengubahnya. Sementara di dalam Islam, bentuk negara bukanlah hal baku. Maka dari itu, pandangan seperti ini perlu memperoleh perhatian serius dan disikapi dengan toleransi supaya tidak menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI di masa mendatang. Masyarakat harus terus disadarkan, bahwa sesuai fikih Islam, bentuk negara bukanlah suatu kebakuan, tetapi bisa menyesuaikan dengan kesepakatan atau kebutuhan warga negaranya. Kesepakatan yang telah disusun para pendiri bangsa, mesti selalu disepakati dengan tetap menjaga saling toleransi antar umat beragama (Setneg 2020).

Walaupun ada perubahan dalam UUD 1945, namun ada pembatasan dalam perubahan, dimana sebagai bagian dari konsep pembentukan suatu konstitusi (*constitution making*) pada prosesnya harus mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aspek historis dan perdebatan dalam pembentukan konstitusi UUD 1945 tentang pemelihan formula NKRI oleh para *founding father* menjadi sebuah latar belakang kuat supaya terus mempatenkan bagi negara Indonesia bentuk NKRI (Prayitno 2018, 745).

***Interrelationship* Penunaian Ibadah Haji dengan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI**

1. *Interrelationship* sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Fakta historis tersebut terdapat relasi identik ibadah haji dengan perkembangan Islam di Indonesia sebagai sebuah bangsa dan eksistensinya

sebagai sebuah negara. Saat Indonesia masih belum terbentuk dimana era kerajaan menjadi patron di Nusantara, para Raja atau Pangeran telah banyak yang menunaikan ibadah haji Hal ini juga menunjukkan bahwa jaringan haji sudah terbentuk di era masa kerajaan Nusantara yang dikemudian hari memunculkan semangat patriotisme melawan kolonialisme dari tanah air.

Fakta dapat dilihat semisal Raden Fatah Demak mengirimkan bala tentaranya di bawah pimpinan Panglima Pati Unus untuk mengusir Portugis dari Tanah Malaka. Serangan itu terjadi tahun 1513 dilengkapi 12.000 pasukan dan 100 kapal perang. Di bawah kepemimpinannya dan dibantu Walisongo, Islam berkembang pesat di tanah Jawa. (Susilo dan Wulansari 2019, 78)

Fatahillah (Syarif Hidayatullah) bersama bala tentaranya berjuang mengusir penjajah Portugis dari Sunda Kelapa yang kemudian 22 juni 1527 diganti oleh beliau dengan nama Jayakarta. Perang ini sebagai misi menebar Islam di Jawa Barat (RI 2006). Nama *Fatehan* kali pertama disematkan [João de Barros](#) saat melaporkan kapal Brigantin terdampar di Sunda Kelapa karena diserang pasukan Muslim pimpinan Fatahillah dan semua laskar Portugis terbunuh di kapal itu (Barros 2012, 85). Sultan Agung Hanyokrokusumo dan pasukannya tahun 1628 mengobarkan perang menyerbu Belanda di Batavia. Berikutnya tahun 1626 beserta 14.000 pasukan menyerbu Belanda untuk kedua kali (Encyclopædia Britannica 2020).

Era berikutnya pejuang kemerdekaan hasil didikan haji tidak surut, seperti Pangeran Diponegoro dengan semangat *jihad fi sabilillah* mengusir Belanda dengan strategi gerilya. Imam Bonjol sepulang haji melakukan perlawanan dengan pasukan Paderi-nya. HOS Cokroaminoto sepulang haji mendirikan Sarekat Islam. Ki Hajar Dewantara berjuang dengan strategi menghidupkan pendidikan. Muhammad Darwis sepulang mendirikan Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari sepulang mendirikan Nadhlatul Ulama. Samanhudi sepulang haji mendirikan Sarekat Dagang Islam.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji memiliki hubungan timbal balik dengan semangat kemerdekaan, disatu sisi ibadah haji menambah

pengetahuan dimana disana banyak bertukar pikirang dengan jemaah haji dari berbbgai belahan dunia, dan di sisi haji menumbuhkan semangat juang kemerdekaan merupakan hak dari semua bangsa. Dari sinilah patriotisme muncul sebagai dampak tumbuhnya keyakinan agama.

Ibadah haji muslim Nusantara awalnya tanpa halangan, namun sejak datangnya Belanda pimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596 (Djakaria 2014, 71) keadaan berubah. Mereka menyadari umat Islam Nusantara yang berhaji akan berinteraksi dengan muslim seluruh dunia. Hal ini bisa memunculkan ide *progresif-radikal*; sebuah kesadaran perlawanan terhadap kaum penindas Maka Belanda berusaha mengantisipasi dengan kebijakan Resolusi Haji tahun 1825, untuk membayar paspor 110 gulden. Bagi yang melanggar, didenda 1.000 gulden. Satu jumlah yang fantastis pada waktu itu.

Pengetatan terjadi tahun 1831, warga Indonesia yang berhaji tanpa pas jalan dari pemerintah Belanda, setelah pulang didenda 220 gulden,- (Harapan dan Murdisi 2003, 34). Namun kebijakan tersebut banyak ditentang, karenanya banyak muslim Nusantara berangkat haji melalui Singapura dan Malaka. Tahun 1852 Belanda menghapus *Resolusi Haji* tersebut, dan hanya memberlakukan pas jalan, serta memberikan itruksi terhadap pemerintahan daerah agar mengawasi jemaah dan aturan wajib lapor saat pergi dan pulang haji (Zaenal 2012, 99)

Tahun 1859 Belanda mengeluarkan kebijakan *Ordonansi Haji* disebabkan banyaknya alumni haji yang *progresif-radikal* dan sebagian jemaah tidak kembali lagi ke Nusantara (Madjid dan Wahyudi 2014, 95). Kebijakan ini mewajibkan ijin berangkat dan melapor sepulang haji kepada penguasa setempat untuk diuji. Andai lulus, ia diperkenankan menyandang gelar dan pakaian haji, berupa sorban, peci putih maupun jubah, juga berhak atas sertifikat haji (Jannah 2018). Kebijakan ini tahun 1922 direvisi sebab ada desakan dari muslim Nusantara dan organisasi keagamaan semisal Nahdhatul Oelama dan Muhammadiyah, menuntut perbaikan layanan perjalanan haji.

Menyerahnya tanpa syarat Belanda terhadap Jepang, berarti akhir kolonialis Belanda atas Nusantara (Poesponegoro dan Notosusanto 2014, 11). Namun,

Jepang (1942- pertengahan 1945), juga memberlakukan ‘*Politik Islam*’, sebab khawatir ajaran Islam, lebih banyak memberikan kelonggaran. Pertengahan tahun 1942 didirikanlah kantor urusan agama yang disebut *Shumubu* untuk tingkat pusat dan tingkat daerah. Aturan haji yang lain berasal dari Belanda tetap berlaku selama aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Jepang (Harapan dan Murdisi 2003, 50).

Dari uraian di atas dapat relasi timbal balik antara penunaian ibadah haji dan kedaulatan negara sebelum kemerdekaan RI, lebih mengarah kepada pengakuan atas sebuah bangsa. Di masa era keajaan, kedaulatan lebih kepada pengakuan sektoral sesuai dengan teritorialnya. Adapun masa mendekati kemerdekaan sudah mulai terbangun kesadaran atas pentingnya sebuah negara kesatuan. Para haji merupakan pejuang di garda depan mewujudkan ide-ide perjuangan tersebut. Betapapun penjajah membuat kebijakan *engennering* haji demi memuluskan kelestarian menjajah namun pengaruh ibadah haji dipandang mengekalkan pengaruhnya kepada umat sebagaimana diutarakan (Blunt 2014), terbukti interaksi dalam haji menumbuhkan militansi ilmu yang mumpuni, semangat juang tinggi.

Betapa banyak para haji nusantara yang mumpuni agama sepulang dari haji kemudian menggerakkan semangat *jihad* mengusir para penjajah. Di masa awal semisal Raden Fatah (Demak), Syarif Hidayatullah (Jawa Barat) Sultan Agung Hnayokrokusumo (Mataram), Sultan Ageng Tiryoyoso (Banten) Pangeran Diponegoro (Perang Jawa) Imam Bonjol (Perang Paderi). Di masa Pra kemerdekaan di antaranya Ki Hajar Dewantoro, KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, HOS. Tjokroaminoto, A. Hasan, H. Agus Salim, KH. Abdul Wahab Hasbullah, dan masih banyak lainnya.

Dari sini dapat dipahami, gelar haji pada awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk “*political engineering*” dalam rangka melegitimasi dan mengidentifikasi para alumni haji, namun pada akhirnya oleh umat muslim Nusantara, dijadikan sebuah apresiasi dan motivasi khususnya bagi para haji untuk bisa memantaskan diri. Esensi yang terpatir pada kedalaman diri melalui tempaan haji berrelasi timbal balik melahirkan semangat patriotisme atas nama *jihad* memerangi musuh negeri.

2. *Interrelationship* Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Pasca Indonesia merdeka, bangsa dihadapkan dengan rongrongan Belanda yang berniat kembali menguasai Indonesia. Belanda melihat kedudukan Indonesia belum jelas di mata hukum internasional. Ada syarat yang pasti dipenuhi bagi berdirinya suatu bangsa; *pertama*, memiliki wilayah tertentu; kedua, memiliki rakyat yang berdomisili di suatu wilayah; ketiga, terdapat pemerintah yang berdaulat. Ketiganya adalah kesatuan yang tak terpisahkan. Walau syarat wilayah dan rakyat terpenuhi, tetapi jika pemerintahannya tidak berdaulat secara nasional belumlah dikatakan negara merdeka (Kusnari 1988, 291).

Masa awal kemerdekaan Indonesia, sulit memperoleh pengakuan kedaulatan. Negara berdaulat ialah negara dengan pemerintahan mandiri, punya payung hukum, tidak terikat negara lain, dan bisa menentukan nasib sendiri (Setia 2019). Untuk mendapat pengakuan kedaulatan, Indonesia menempuh dua jalan; perang fisik serta politik diplomasi (Fauzi dan Hasanah 2019, 111). Diplomasi politik atau publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara dengan tujuan memberi pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan yang diambil negaranya (Milfont and Gouveia 2006, 78).

Dalam hukum internasional, pengakuan keberadaan sebuah negara mengarah kepada *de facto* dan *de jure* (Ismi 2012, 139). Pengakuan *de facto* adalah pengakuan sementara, sebab pengakuan tersebut menunjuk realitas tentang kedudukan pemerintah baru, jika kemudian dipertahankan *kontinu* dan perkembangannya maju, berubah secara natural menjadi pengakuan *de jure* yang sifatnya tetap, diikuti tinakan hukum lainnya. Pengakuan *de jure* merupakan pengakuan sebuah negara atas negara lain, diikuti tindakan hukum tertentu, seperti menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama antar kedua negara (Ismi 2012, 136).

Politik diplomasi sangat diperlukan Indonesia di masa awal kemerdekaan, sebab banyak negara lain belum mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Penyebabnya, berita tentang hal tersebut diblokade Belanda dan diganti berita lain dalam forum-forum Internasional (Fauzi dan Hasanah 2019, 112). Boleh dikata,

rentang waktu 1945-1950, politik diplomasi yang berhasil hanya ke Mesir. Tanggal 23 Maret 1946, Mesir membuat pernyataan atas kemerdekaan Republik Indonesia secara *de facto* (Rahman 2007, 154).

Dari sini pemerintah Indonesia tahun 1848 mengirim delegasi haji demi misi diplomasi, menarik simpati kemerdekaan Republik Indonesia. Kesempatan ini digunakan Indonesia melakukan pengalihan kepada Belanda, dengan dalih menuaikan ibadah haji. Mendengar datangnya delegasi haji Indonesia, sekitar 3000 *mukimin* Indonesia menyambut dengan antusias kedatangan mereka, sambil memekikan kata “*merdeka, merdeka, merdeka!!! Jaiꝑ Jumburiah Indonesia*” (Douwes dan Kaptein 1997, 17).

Delegasi haji ditemani H. Rosjidi melakukan kunjungan resmi menghadap Raja Ibn Saud di istana negara. Raja menyambut rombongan misi haji Indonesia duduk berdampingan dengan pimpinan delegasi Mohammad Adnan. Ia mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengajak seluruh umat Islam bersatu mengusir penjajah. Selanjutnya, delegasi haji Indonesia mendirikan kemah berdampingan dengan kemah jajaran diplomatik negara Islam. Hal ini menunjukkan kedaulatan Indonesia, sejajar dengan negara lain (Najmuddin 2017).

Saat menuaikan wukuf di Arafah 18 Oktober 1948 delegasi haji ini disambut sekitar 500 waraga Indonesia, memberikan penjelasan perjuangan bangsa Indonesia dan meminta dukungan mereka, sambil mengibarkan bendera merah putih Indonesia. Pimpinan delegasi Mohammad Adnan memimpin doa: *Labbaik! Allahuma Labbaik! Ya, Allah! Kami datang ke hadapan-Mu, untuk memohon. Berikan kami, bangsa Indonesia kemenangan dalam menegakkan kemerdekaan*. Ismail Banda berorasi di media pers Arab Saudi tentang perjuangan Indonesia melawan penjajah Belanda. Secara politis misi haji ini mengundang simpati negara-negara muslim, mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto* dan *de jure* (Muralis 2015).

Fakta di atas menggambarkan bahwa para haji tidak bisa dipisahkan dari pergolakan mencari pengakuan atas kemerdekaan yang telah dicapai agar memiliki kekuatan hukum di hadapan internasional, baik secara *de facto* maupun *de jure*. Jika perjuangan para haji sebelum kemerdekaan lebih kepada cara-cara fisik karena

belum punya 'wadah' negara, maka pada periode pasca kemerdekaan lebih menekankan kepada bagaimana negara yang masih baru tersebut dikenal dan diakui eksistensinya. Perjuangan menjaga kedaulatan dan keutuhan saat kekinian berupa usaha-usaha untuk bertindak terbaik sesuai tupoksi masing-masing.

Pengaruh para haji yang menetap di Mekkah juga tidak bisa diabaikan, dengan doktrin kitab tentang *jihad* semisal, *Nasihab al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin*, karya Syaikh Abd al-Samad Al-Palimbani berkisah tentang memerangi penjajah kemudian dibawa pulang oleh para haji. Hasilnya, menginspirasi perjuangan para ulama, kyai dan santri serta rakyat untuk melawah kolonisasi Belanda. Maka lahirlah laskar berbasis Islam semisal laskar laskar Sabillah dan laskar Hizbullah yang bahu-membahu membantu perjuangan kemerdekaan. Tidak boleh dilupakan bagaimana Resolusi Jihad KH. Hasyim Asyari mengobarkan semangat perjuangan rakyat mengusir penjajah dari bumi pertiwi.

D. Penutup

Setelah dilakukan kajian yang mendalam, penelitian memberikan hasil: bahwa Ibadah haji merupakan ritual yang memberi kesan mendalam terhadap umat sehingga bisa menumbuhkan militansi ilmu yang mumpuni dan semangat juang tinggi. Semangat ini mampu menggerakkan orang bertindak berani mengorbankan jiwa raga atas nama negara demi agama. Di sini terdapat aksi dan reaksi timbal balik antara keduanya, di satu sisi ibadah haji bisa ditunaikan bagi warga negara yang berdaulat, dan negara membutuhkan warganya untuk mewujudkan dan menjaga kedaulatannya. Relasi timbal balik ini saling mengikat satu sama lain sehingga menjadi keutuhan NKRI, maka segala tindakan yang menimbulkan persepsi buruk bagi Indonesia termasuk kategori menciderai kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Daftar Pustaka

- Abdul Syukur, dkk. 2020. "Haji Oemar Said Tjokroaminoto: Biografi, Dakwah dan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 5, no. 2: 177-190.
- Abdullah, Abdul Rahman. 2016. *"Sejarah, Tamadun, Islam, Masjidi, Nusantara, Biografi Agung Syaikh Aryad Al-Banjari"*. Malaysia: Karya Bestari.
- Anam, Hairul. 2014. "Aswaja dan NKRI : Upaya Mempertahankan NKRI melalui Aswaja." *Jurnal Islamuna* Vol. 1, no. 2: 210-228.

- Barros, João De. 2012. *Da Asia De João De Barros: Dos Feitos, Que Os Portuguezes Fizeram No Descubrimento, E Conquista Dos Mares, E Terras Do Oriente. Decada Quarta. Parte Primeira*. Vol. IV. Lisbon: Na Regia Officina Typografica.
- Bisnis.com. 2012. *Kabar Haji : 60.000 Jamaah Ilegal Dideportasi*. 25 Oktober. <https://kabar24.bisnis.com/> (diakses Juli 30, 2022).
- Blunt, Wilfrid Scawen. 2014. *The Future of Islam*. London: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Djakaria. 2014. *Sejarah Indonesia II*. Yogyakarta: Ombak.
- Douwes, Dick, dan Nico Kaptein. 1997. *Indonesia dan Haji*. Dialihbahasakan oleh Soedarso Soekarno dan Theresia Slamet. Jakarta: INIS.
- Encyclopædia Britannica. 2020. *Mataram, Historical kingdom, Indonesia*. 4 Agustus. <https://www.britannica.com/biography/Agung> (diakses Juli 30, 2022).
- Faturrozi. 2022. *Ulama Nusantara yang Mendunia (2): Syekh Junaid Al-Batawi*. 24 Mei. <https://www.duniasantri.co/> (diakses Juli 30, 2022).
- Fauzi, Hilman. 2022. *Wamenag Imbau Sepulang Haji Jemaah Makin Cinta Indonesia dan Sayang Sesama Makhluk*. Disunting oleh Husni Anggoro. 27 Juli. <https://haji.kemenag.go.id/> (diakses Juli 28, 2022).
- Fauzi, Wildan Insan, and Neni Nurmayati Hasanah. 2019. "Diplomat dari Negeri Kata-Kata (Politik Diplomasi Haji Agus Salim pada Inter Asia Relatin Conference dan Komisi Tiga Negara)." *Jurnal Historia* Vol. 2, no. 2: 111-114.
- Hafi, Muhammad. 2020. "*Sejarah Perjuangan Misi Haji Pertama Indonesia yang Heroik*". April 13. <https://ihram.republika.co.id/> (accessed Juli 26, 2022).
- Hamid, Abdul. 2018. "Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Penguatan Nasionalisme di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 17, no. 1: 19-41.
- Harapan, Sumur, dan Murdisi. 2003. *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*. Jakarta: Intimedia Ciptanusantara.
- Hassan, M. Zain. 1980. *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismi, Hayatul. 2012. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, no. 1: 135-146.
- Jannah, Rina Farihatul. 2018. *Kebijakan penyelenggaraan perjalanan haji Indonesia tahun 1945-2000 M*. Thesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Kemenhub. 2010. "Menteri Agama Lepas Keberangkatan Jemaah Haji di Medan."

- Kementerian Perhubungan RI. 12 Oktober. <http://dephub.go.id/> (diakses Juli 29, 2022).
- Khan, Qaisra M., and Nasser David Khalili. 2022. *Hajj and the arts of Pilgrimage*. British: Assouline.
- Kharismaningtyas. 2022. *Kasus Pemulangan Haji Furoda, Menag Yaqut Cholil: Jika ada Pelanggaran, Travel akan Disanksi*. 22 Juli. <https://www.kompas.tv/> (diakses Juli 29, 2022).
- Kompasiana. 2017. *Kisah Perjalanan Haji Sunan Gunung Jati*. Februari 17. <https://www.kompasiana.com/> (accessed Juli 30, 2022).
- KompasTV. 2022. *Imbas Haji Furoda Bervisa Tak Resmi Dipulangkan Pemerintah Arab Saudi, Jalur Masuk Mekkah Diperketat*. Directed by Kharismaningtyas. YouTube.
- KompasTV. 2021. *Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Directed by Jeje Jainudin. YouTube.
- Kusnari, Moh. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Madjid, M. Dien, dan Johan Wahyudi. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pernadamedia.
- Mehden, Von Der. 1993. *Two Worlds of Islam: Interaction between Southeast Asia and the Middle East*. Gainesville: University Press of Florida.
- Milfont, Taciano L., and Valdiney V. Gouveia. 2006. "Time Perspective and Values: An Exploratory Study of Their Relations to Environmental." *Journal of Environmental Psychology* Vol. 20, no. 1: 72-82.
- Muralis. 2015. *Fakta Sejarah, Peran Al Washliyah Dalam Misi Haji Dan Kemerdekaan*. 27 Juli. <http://kabarwashliyah.com/> (diakses Juli 30, 2022).
- Najmuddin, Ajie. 2017. *Peristiwa Monumental Bendera Merah Putih Berkibar di Arafah*. 2 September. <https://www.nu.or.id/> (diakses Juli 30, 2022).
- Nueuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. 7nd. Harlow: Allyn and Bacon.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. 2014. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prayitno, Cipto. 2018. "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making." *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, no. 4: 732-751.
- Putuhena, Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Rafie, Barratut Taqiyah. 2022. *Sanksi Arab Saudi: Deportasi 10 Tabun Bagi Jemaah Haji*

- yang Tak Berizin*. 2 Juni. <https://internasional.kontan.co.id/> (diakses Juli 30, 2022).
- Rahman, Suranta Abd. 2007. "Diplomasi R.I di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947." *Jurnal Wacana* Vol. 9, no. 2: 154-172.
- RI, Departemen Penerangan. 2006. *Kotapradja Djakarta Raya*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Rosyid, Moh. 2017. "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal." *Jurnal Ijtihad* Vol. 17, no. 2: 241-259.
- Saidurrahman, dan Arifinsyah. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan : NKRI Harga Mati*. 2. Jakarta: Kencana.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Setia, Agil Burhan, dkk,. 2019. "Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 di Indonesia." *Mimbar Yustitia* Vol. 3, no. 1: 30-42.
- Setneg. 2020. "Bentuk NKRI Adalah Hasil Kesepakatan Bersama." *Kementerian Sekretaris Negara RI*. 9 November. <https://www.setneg.go.id/> (diakses Juli 29, 2022).
- Shaifudin, Arif. 2020. "Pendidikan Islam Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Jurnal Studi Agama El-Wasathiya* Vol. 8, no. 1: 29-40.
- Siregar, Tongkulem. 2022. *Jamaah Haji Wajib Jaga Kesehatan dan Nama Baik NKRI*. Disunting oleh Revi. 18 Juni. <https://rri.co.id/pekanbaru/> (diakses Juli 28, 2022).
- Solahudin, M. 2012. *5 Ulama Internasional dari Pesantren*. Kediri: Nous Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suminto, Husnul Aqib. 1996. *Politik Islam Hindia Belanda*. 3. Jakarta: LP3ES.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2018. *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Republik Indonesia*. Bandung: Salamadani.
- Susilo, A., dan R. Wulansari. 2019. "Peran Raden Fatah Dalam Islamisasi di Kesultanan Demak Tahun 1478–1518." *Kebudayaan dan Sastra Islam* 19, no. 1: 70-83.
- TvOne. 2022. *Heboh! Ribuan Jamaah Haji 2022 Furoda Gagal Berangkat*. Directed by AKIP TvOne. YouTube.
- Waal, Van Der. 1994. *Officiële Bescheiden Betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950*. 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus : Desain & Metode*. Dialihbahasakan oleh M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zaenal. 2012. "Regulasi Haji Indonesia dalam Tinjauan Sejarah." *Jurnal Juris* Vol. 11, no. 2: 96-113.